

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelompok tani merupakan wadah kelembagaan yang berfungsi menjadi sarana musyawarah antar petani. Selain itu, organisasi ini berperan dalam mempercepat pelaksanaan pengembangan sektor pertanian. Pembentukan kelompok tani ditujukan bagi petani, dengan tujuan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani (Sunanto, 2004).

Kelompok tani merupakan suatu kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk oleh petani melalui mekanisme terorganisir dalam kegiatan usaha tani. Menurut Kementerian Pertanian tahun 2013, kelompok tani adalah himpunan petani, peternak, atau pekebun yang terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, maupun sumber daya), serta hubungan keakraban, dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Kelompok ini dibentuk oleh petani dan ditujukan bagi petani, untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi serta memperkuat posisi mereka dalam memasarkan produk pertanian.

Kelembagaan petani di Indonesia masih memerlukan pembenahan. Saat ini, kelembagaan seperti Kelompok Tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) belum berkembang menuju Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Fokus kelembagaan yang ada masih terbatas pada aspek produksi dan belum mencakup kegiatan pasca-produksi. Kondisi tersebut belum sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menekankan pentingnya usahatani berskala ekonomi, berorientasi pasar, dan berbasis kawasan korporasi.

Kelembagaan petani secara umum memiliki sejumlah peran penting, yaitu: (a) peran organisasi (*interorganizational task*) yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan negara, (b) peran pengelolaan sumber daya (*resource tasks*) yang meliputi mobilisasi serta pemanfaatan informasi, material, modal, dan terutama tenaga kerja untuk mencapai tujuan masyarakat, serta (c) peran pelayanan (*service tasks*) bisa mencakup permintaan layanan yang mengekspresikan orientasi pembangunan atau pengaturan kebutuhan masyarakat

daerah, dan (d) tugas antar organisasi (*extra-organizational task*) menuntut adanya kebutuhan lokal yang diarahkan kepada birokrasi atau organisasi di luar masyarakat, khususnya terkait intervensi yang dilakukan oleh agen eksternal (Esman dan Uphoff dalam Garkovich, 1989).

Kelembagaan Ekonomi Petani merupakan wadah yang dibangun oleh, dari, dan untuk petani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani, dengan tujuan peningkatan produktivitas serta efisiensi, kelembagaan ini mencakup Lembaga yang belum berbadan hukum maupun telah berbadan hukum (Permentan No. 67, 2016). Namun, dalam proses transformasi kelembagaan petani menuju kelembagaan ekonomi, masih ada sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, rendahnya infrastruktur teknologi, akses pembiayaan yang terbatas, kualitas pengelolaan usaha tani yang belum optimal, produksi yang belum mencapai skala ekonomi, serta manajemen bisnis yang belum profesional.

Realitas yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa mayoritas aktivitas pertanian di Indonesia ditopang oleh petani dengan kapasitas usaha terbatas yang berasal dari petani kecil. Jumlah pelaku usaha pertanian terus meningkat setiap tahun, namun tingkat kesejahteraannya masih rendah. Kondisi ini tercermin dari hasil Sensus Pertanian (SP) Tahun 2020 dibandingkan dengan Sensus Pertanian (SP) tahun 2019. Skala usaha yang terbatas membuat petani kesulitan meningkatkan pendapatan sehingga tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan petani tidak hanya disebabkan oleh sempitnya lahan garapan, tetapi juga oleh rendahnya produktivitas, keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar, serta kapasitas petani yang masih lemah.

Kelembagaan pertanian yang diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani pada dasarnya diharapkan mampu berperan sebagai instrumen penting dalam mengurangi berbagai aspek risiko usaha tani (Amam dan Soetriono, 2019; Amam dan Solikin, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, upaya untuk mewujudkan kedaulatan serta kemandirian pangan nasional tidak hanya membutuhkan keberadaan kelompok tani semata, tetapi juga menuntut hadirnya pelaku usaha

yang profesional. Salah satu contoh nyata dari kelembagaan tersebut dapat dilihat pada kelompok tani yang berkembang di Desa Curahlele, yang menjadi bagian dari aktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan pertanian.

Kelompok tani dikembangkan menjadi gabungan beberapa kelompok dalam satu wilayah administratif desa, yang disebut Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No 93/Kpts/OT.2103/3/1997 tentang pembinaan kelompok tani-nelayan. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada dasarnya merupakan himpunan dari sejumlah kelompok tani yang menjalankan kegiatan agribisnis dengan berlandaskan prinsip kebersamaan serta kemitraan. Melalui sinergi tersebut, Gapoktan diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi sekaligus pendapatan usaha tani, tidak hanya bagi para anggotanya, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani lain di sekitarnya (Syahyuti, 2007).

Secara konseptual, peran kelompok tani dapat dipahami sebagai representasi dari berbagai aktivitas yang dijalankan oleh anggota kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Aktivitas tersebut dapat mencakup jenis usaha tertentu maupun unsur-unsur dalam subsistem agribisnis, seperti penyediaan sarana produksi, kegiatan pemasaran, penanganan pasca panen, hingga pengolahan hasil pertanian. Pemilihan bentuk kegiatan kelompok tani sangat dipengaruhi oleh faktor kesamaan kepentingan, kondisi sumber daya alam, aspek sosial ekonomi, tingkat keakraban, rasa saling percaya, serta keharmonisan hubungan antarpetani. Keseluruhan faktor tersebut berfungsi sebagai perekat yang menjaga keberlangsungan kehidupan berkelompok (Syahyuti, 2007).

Berdasarkan data Verifikasi dan Validasi (Verval) di Kecamatan Balung tahun 2020 terdapat 57 kelompok tani dan 8 Gapoktan yang berfungsi sebagai kelembagaan petani di bawah binaan penyuluh pertanian tingkat desa maupun kelurahan. Seluruh kelembagaan tersebut berada dalam naungan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Balung yang berafiliasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember. Berdasarkan data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) Kementerian Pertanian tahun 2023, jumlah anggota Gapoktan di wilayah Kecamatan Balung mencapai 6.360

orang. Mereka mengelola lahan pertanian dengan total luas 3.240 hektar sawah dan 304 hektar tegalan. Potensi utama yang dikembangkan meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, serta komoditas hortikultura, dan juga tanaman perkebunan berupa tembakau. Dalam satu tahun, kegiatan usaha tani di wilayah ini rata-rata berlangsung dalam tiga musim tanam, yaitu Musim Tanam I pada bulan Desember hingga Maret, Musim Tanam II pada bulan April hingga Juli, serta Musim Tanam III pada bulan Agustus hingga November, dengan pola tanam yang umum berupa Padi–Padi/Jagung–Jagung/Tembakau. Di Kecamatan Balung Kelembagaan Kelompok Tani aktif berjumlah 40 kelompok tani atau 70% sedangkan yang 17 kelompok tani atau 30% kelembagaannya tidak aktif dan salah satunya ada di Kelompok Tani Desa Curahlele.

Berdasarkan hasil *wawancara* dengan kelompok tani atau gapoktan Barokah di Desa Curahlele Kelembagaan petani belum memberikan kontribusi pada pemberdayaan petani, antara lain yakni rendahnya partisipasi anggota tingkat kehadiran di tiap rapat atau pertemuan kelompok tani sangat rendah tidak sampai 50% dari jumlah anggota kelompok tani. Ketergantungan pada bantuan pemerintah tanpa ada inovasi dimana kelompok tani hanya berfungsi sebagai saluran bantuan pemerintah saja seperti pupuk, bibit, dan alat pertanian bukan sebagai wadah inovasi atau pengembangan secara mandiri, rendahnya kemampuan manajemen internal yaitu fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) tidak diterapkan secara efektif dalam kelembagaan seringkali hanya berdasarkan kesepakatan informal, ketiadaan aturan yang jelas menunjukkan tidak adanya aturan tertulis mengenai pembagian kerja dan kewenangan antar anggota sehingga sulit untuk menjalankan organisasi secara profesional, kurangnya akses ke sumber daya dan pasar yang diakibatkan oleh lemahnya pengelolaan kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas.

Upaya penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan kelembagaan pertanian seyogianya melibatkan berbagai unsur kelembagaan, mulai dari kelompok tani, lembaga penyedia input produksi, lembaga pengelola output, lembaga penyuluhan, hingga lembaga permodalan. Seluruh elemen tersebut perlu

berintegrasi secara sinergis dalam rangka memecahkan permasalahan pertanian, dengan harapan solusi yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan sekaligus keberpihakan kepada petani sebagai produsen utama hasil pertanian. Bentuk perlindungan yang dimaksud, baik terhadap petani sebagai penghasil maupun sebagai pihak yang menikmati hasil jerih payah usaha tani, terutama dapat diwujudkan melalui penetapan harga output yang layak. Sebaliknya, pemberian harga output yang tidak sesuai justru menjadi hambatan serius yang merugikan petani, karena keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang atau tengkulak yang memiliki akses permodalan, sementara petani tetap berada pada posisi yang lemah.

Desa Curahlele terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember dan memiliki luas Administrasi 604.480, 311 Ha, Terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun Krajan Kidul, Dusun Krajan Tegan dan Dusun Karang Pakem. Sedangkan batas - batas wilayah yakni:

Sebelah Barat	: Deso Sukorejo
Sebelah Selatan	: Desa Balung Lor
Sebelah Timur	: Desa Gumelar
Sebelah Utara	: Desa Trisnogambar

Tabel 1.1 Luas Wilayah Desa Curahlele

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Wilayah	604.480, 31
2	Luas Prasarana Umum lainnya	16.149
3	Luas Perkantoran	0.311
4	Luas Taman	-
5	Luas Pekarangan	39.156
6	Luas Kuburan	4.631
7	Danau	-
8	Padang gembala	-
9	Hutan Negara	-
10	Luas Perkebunan	-
11	Luas ladang	-
12	Luas Persawahan	518.700
13	Luas Pemukiman	25.484

Sumber data: data primer 2025

Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember memiliki Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Barokah” yang berdiri sejak tahun 2007 membina

atau membawai 8 kelompok tani di Desa Curahlele yaitu: Kelompok Tani Barokah 01, Kelompok Tani Barokah 02, Kelompok Tani Sumber Rejeki, Kelompok Tani Karya Tani, Kelompok Tani Karya Jaya, Kelompok Tani Karya Utama, Kelompok Tani Rukun Tani, dan Kelompok Tani Kurnia Jaya. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Barokah” ini telah memiliki Badan Hukum Indonesia (BHI) yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan HAM. Luas Sawah yang dimiliki di Desa Curalele sebesar 518 ha, luas tegal sebesar 24 ha.

Dari hasil Verifikasi dan Validasi (verval) Kelompok Tani tingkat Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Balung tahun 2020 beberapa anggota Kelompok Tani didapatkan data bahwa kelembagaan kelompok tani di Desa Curahlele 7 Kelompok Tani memiliki Nilai kelas kemampuan kelompok tani di tingkat lanjut memiliki nilai antara 250 - 500 dan 1 kelompok tani di tingkat madya yang memiliki nilai antara 500 - 700. Penilaian kelas kemampuan kelompok tani dilaksanakan berdasarkan beberapa aspek, seperti kapabilitas dalam menyusun rencana, mengorganisasi, melaksanakan berbagai kegiatan, melakukan pengendalian serta pelaporan, sekaligus mengembangkan kepemimpinan di dalam kelompok tani. Gapoktan di Desa Curahlele memiliki Nilai kelas Lanjut dengan skor 251. Sejak tahun 2020 Gapoktan di Desa Curahlele sudah tidak aktif dikarenakan salah satu pengurus Gapoktannya yaitu ketua nya meninggal dunia yang mengakibatkan tidak adanya pertemuan rutin di tingkat kelompok tani di Desa Curahlele. Hal ini mengakibatkan lemahnya komitmen kelembagaan kelompok tani, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan terbatasnya sarana yang ada pada kelembagaan kelompok tani tersebut. Sejalan dengan temuan Irahmayasari (2021), kondisi seperti rendahnya komitmen petani, lemahnya peran Gapoktan, keterbatasan ketersediaan pupuk, serta minimnya akses permodalan merupakan faktor krusial yang memengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan petani.

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka dipandang perlu dilaksanakan suatu studi penelitian dengan judul Strategi penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam meningkatkan Pendapatan Petani: Kasus di Gapoktan Barokah Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian strategi penguatan kelembagaan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani : Kasus di Gapoktan Barokah Desa Curahlele Kecamatan Balung ini yakni :

1. Bagaimana karakteristik kelembagaan petani (kelompok tani) di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana kelembagaan petani di Desa Curahlele berperan sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi petani, memperkuat produktivitas petani, memfasilitasi kerjasama antar petani dan kesejahteraan petani?
3. Faktor - faktor apa saja yang menjadi kekuatan pendorong dan penghambat dalam upaya meningkatkan efektivitas kelembagaan petani (kelompok tani) di Desa Curahlele?
4. Bagaimana struktur hubungan antar faktor - faktor penghambat tersebut dalam mempengaruhi efektivitas kelembagaan petani di Desa Curahlele?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian Strategi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam meningkatkan pendapatan petani : Kasus di Gapoktan Barokah Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember ini yakni.

1. Mengidentifikasi karakteristik kelembagaan petani (kelompok tani) di Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
2. Mengidentifikasi peran kelembagaan petani (kelompok tani) sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi petani, memperkuat produktivitas pertanian, memfasilitasi kerjasama antar petani, dan kesejahteraan petani
3. Mengidentifikasi faktor - faktor yang menjadi kekuatan pendorong dan penghambat dalam meningkatkan efektivitas kelembagaan petani (kelompok tani) di Desa Curahlele
4. Menganalisis struktur hubungan antar faktor - faktor penghambat tersebut dalam mempengaruhi efektivitas kelembagaan petani di Desa Curahlele

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Curahlele, Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan mengambil beberapa kelompok tani yang tidak aktif di Desa Curahlele sejumlah 4 Kelompok Tani. Beberapa aspek yang dikaji yakni karakteristik kelembagaan petani, dinamika keaktifan anggota, peran kelembagaan dalam peningkatan kompetensi, produktivitas dan kerjasama, kesejahteraan petani serta identifikasi faktor pendorong dan penghambat efektivitas kelembagaan. Dan Struktur hubungan antar faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan petani di Desa Curahlele. Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April - Juli 2025.

